

# Peran Politik Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Ahmad Ridwan<sup>1</sup>, Muhammad Ikbal,<sup>2</sup> Muhammad Zaki Rahman<sup>3</sup>

(1) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

(2) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

(3) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

✉ Corresponding author

([drahmadridwansagmpdi@gmail.com](mailto:drahmadridwansagmpdi@gmail.com))

## Abstrak

Catatan sejarah membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang mempunyai peran dalam menentukan kebijakan tersebut. Kajian yang bersifat literistik ini berupaya menyajikan dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia, mulai masa praKemerdekaan sampai dengan masa Reformasi. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu investasi umat di masa depan. Karena secara teoretis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas peradaban manusia pada umumnya. Nilai strategis pendidikan yang umum ini, menyimpulkan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan serta membantu anak didik mempersiapkan kebutuhan hidup yang esensial untuk menghadapi perubahan.

**Kata kunci:** Politik, Pendidikan Islam, Sumber Daya Manusia

## Abstract

Historical records prove that Islamic education policy, especially in Indonesia experiences ups and downs, depending on who has a role in determining the policy. This literary study seeks to present the political dynamics of Islamic education in Indonesia, from pre-Independence to the Reformation. In terms of human resource development, education has a strategic value and has an important role as an investment of the people in the future. Because theoretically, education is the basis of economic growth, the basis of the development of science and technology, reducing poverty and inequality in income, and improving the welfare and quality of civilization in general. This general strategic value of education, concludes that education holds tremendous power to create an overall environmental aspect and can provide the most valuable information about future grips and helps students prepare essential needs for dealing with change.

**Keywords :** *Political, Islamic Education, Human Resources*

## PENDAHULUAN

Sejak manusia diciptakan pertama kali, ia tidak lepas dengan pendidikan. Untuk itu, pendidikan merupakan sesuatu yang mesti ada dalam hidup dan kehidupan dan ia adalah way of life, suatu jalan hidup manusia. Ada asumsi life is education and education is life, dalam arti pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan serta seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan (Ellong & Pawero, 2018). Maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan hidup Islami yang diharapkan tercermin dalam sikap hidup dan keterampilan hidup orang Islam. Sebagaimana dalam ruang lingkup pendidikan Islam yang meliputi; Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan lingkungannya (A. M. Pawero, 2017).

Pendidikan Islam yang berkembang dari awal masuknya ke Indonesia, telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Mulai dari bentuknya (yang sederhana seperti langgar/surau, mesjid, dan pesantren sampai dengan sistem klasikal seperti madrasah merupakan sarana pendidikan Islam di Indonesia yang selalu mengalami dinamika kebijakan dari lingkungan pemerintah yang membawahnya (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019).

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang perjalanan kebijakan pendidikan Islam, mulai dari masa pra kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Dengan strategi penataan kurikulum pendidikan Islam, diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan nasional dan daerah (Ellong & Pawero, 2018).

Pada masa pra kemerdekaan, kebijakan pemerintah Belanda atau Jepang terhadap pendidikan Islam sangat bersifat diskriminatif. Pemberlakuan kebijakan ini tidak lepas dari kepentingan mereka sebagai bangsa penjajah yang merupakan bagian dari politik kolonial. Diskriminasi terhadap pendidikan Islam juga tidak lepas dari kekhawatiran penjajah terhadap umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah, umat Islam yang sangat menentang penjajahan Belanda ataupun Jepang.

Berakhirnya masa penjajahan Belanda dan Jepang, menjadi babak baru kebijakan pendidikan Islam dalam sejarah Bangsa Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Pemerintahan yang dikenal dengan istilah orde lama ini menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam menyusun sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya adalah kebijakan pendidikan Islam (Ismail, 2016).

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wajar jika pemerintah orde lama memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan Islam baik di sekolah negeri ataupun swasta. Namun dengan adanya kondisi negara yang masih belum stabil akibat tarik ulur kepentingan antara petinggi negara yang berbeda haluan, menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Orde baru merupakan kelanjutan pemerintahan orde lama yang berakhir pada tahun 1966. Pada pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, sistem pendidikan nasional, termasuk sistem pendidikan Islam bertujuan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun pada tarap implementasinya, kebijakan tersebut bersifat sentralistik.

Pendidikan Islam mendapatkan angin segar ketika masa reformasi menggantikan 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia. Masa reformasi membuka belenggu demokrasi. Hal ini ditandai dengan sistem pendidikan yang awalnya berada di bawah kendali pemerintah pusat (sentralisasi), kemudian diubah kebijakan pendidikan dengan kebijakan desentralisasi sistem pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam.

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan tidak lepas dari kondisi dan situasi politik suatu negara yang dilakukan oleh kekuatan sosial yang ingin mengendalikan pemerintahan tersebut. Sebenarnya, kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di lingkungan lembaga pendidikan.

Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai jalur, diantaranya melalui pendidikan. Pendidikan ini merupakan jalur peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih menekankan pada pembentukan kualitas dasar, misalnya keimanan dan ketakwaan, kepribadian, kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas dan sebagainya (Abdul Latif, 1996).

Dalam hal pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu investasi di masa depan. Karena secara teoretis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya (John Vaizey, 1980). Nilai strategis pendidikan yang makro ini, menyimpulkan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan serta membantu anak didik mempersiapkan kebutuhan hidup yang esensial untuk menghadapi perubahan.

Pendidikan lebih merupakan model untuk pembentukan maupun pewarisan nilai-nilai keagamaan dan tradisi masyarakat. Artinya, misi pendidikan dianggap berhasil ketika anak didik sudah mempunyai sikap positif dalam beragama dan memelihara tradisi masyarakatnya (Malik Fajar, 1999). Kini, paradigma pendidikan seperti itu harus direkonstruksi agar sumber daya manusia muslim tidak acuh terhadap persoalan yang terkait dengan kepentingan ekonomi, ketenaga-kerjaan, dan persoalan lainnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai etik dan moral Islam.

Titik sentral yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya suatu bangsa dalam membangun negaranya tergantung dengan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga timbul pertanyaan, sumber daya manusia yang seperti apakah yang dikatakan berkualitas?

## METODE PENELITIAN

Metode studi literatur yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Semua informasi dan data yang diperoleh merupakan data sekunder. Data tersebut berasal dari berbagai penelitian buku, jurnal dan *proceedings* yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji hasil-hasil dalam literatur yang dikumpulkan sehingga dapat memberikan informasi tentang Peran Politik Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tahap analisis yang dilalui diawali dengan pengumpulan literasi pada pokok pembahasan yang mengacu pada peran politik dan kualitas sumberdaya manusia. Pokok bahasan tersebut dibaca, dipelajari, dianalisis dan dipahami oleh penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian. Hasil yang diperoleh dikaitkan dan disesuaikan dengan konteks judul dalam artikel ini.

## PEMBAHASAN

### Definisi Politik

Secara etimologi, kata politik berakar dari bahasa Inggris *politic* adalah sinonim dari kata *wise* dan *sensible* yang berarti tindakan, bijaksana, kebijaksanaan atau kebijakan (Oxford, 2011). Sedangkan dalam perspektif terminologi, para tokoh berbeda pendapat. Sebagaimana menurut Roger F. Soltou, yang dikutip oleh Budihardjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut serta hubungan antara negara dengan warganya dan dengan negara lainnya. J. Barents mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mengamati kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat (Budihardjo, 2001).

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa definisi politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan atau semua urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, atau kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani masalah (Tim Redaksi, 2011).

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan kewenangan penguasa negara tentang hal-hal yang terkait dengan kepentingan negara tersebut dengan masyarakatnya atau dengan negara lain dengan memiliki tujuan untuk memperoleh apa yang dicita-citakan.

### Pendidikan Islam

Ada tiga term dalam bahasa Arab yang menjadi padanan pendidikan Islam yaitu *ta'lim*, *ta'dib*, dan *tarbiyah*. Pendidikan disebut dengan *ta'lim* yang berasal dari kata *'allama* berkonotasi pembelajaran yaitu semacam proses transfer ilmu pengetahuan. Dalam kaitan pendidikan, *ta'lim* dipahami sebagai proses bimbingan yang ditekankan pada aspek peningkatan kognisi peserta didik (Jalaluddin, 2004). Istilah *ta'lim* dalam hal ini memberikan tendensi pada proses interaksi edukatif dalam rangka peraih tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Istilah yang kedua yaitu *ta'dib* yang berasal dari kata *addaba* memiliki konotasi sebuah proses pembinaan yang lebih menekankan pada perbaikan mental manusia yang erat hubungannya dengan masalah moral dan lebih berorientasi pada pengembangan dan peningkatan martabat manusia.

Sedangkan *tarbiyah* yang berasal dari kata *robbaa*, pada hakikatnya merujuk kepada Allah selaku *Murabby* (pendidik) sekaligus alam. Kata *Rabb* (Tuhan) dan *Murabby* (pendidik) berasal dari akar kata seperti termuat dalam Q.S. Al-Isra': 24. Istilah ini dapat dipahami sebagai sebuah proses pendidikan yang dilakukan dengan sadar dan terprogram, teratur, sistematis, penuh pertimbangan, dan terarah pada tujuan (Muhmidayeli, 2011).

Adapun definisi pendidikan Islam, para tokoh berbeda pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Muhmidayeli, menurut Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani adalah sebuah usaha untuk mengubah perilaku setiap individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat bahkan dalam kehidupan alam sekitarnya (Muhmidayeli, 2011).

Sedangkan menurut Ahmad D Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Marimba, 2009). Senada dengan Marimba, Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim (Achmadi, 2002).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk melakukan transformasi pengetahuan (aspek kognitif), membentuk perilaku yang baik pada peserta didik (aspek afektif) serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya (aspek psikomotorik) yang berakhir pada terbentuknya individu yang sempurna (insan kamil).

### Definisi Politik Pendidikan Islam

Suatu negara dikatakan maju adalah negara yang memiliki pendidikan yang baik. Sebaliknya, negara itu dikatakan negara tertinggal apabila pendidikan masyarakat di negara tersebut sangat rendah. Maka dari itu, pendidikan dan negara sebagai organisasi politik merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai pemegang kebijakan politik, pemerintah memiliki peranan besar dalam mengembangkan dan memperbaiki kualitas pendidikan. Pergolakan politik, artinya turun-naiknya iklim politik di suatu negara akan menciptakan kondisi pendidikan di negara tersebut.

Pendidikan dan politik sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan (Sirozi, 2010).

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di negara-negara Barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya.

Eratnya hubungan antara politik dan pendidikan dalam sejarah Islam, menimbulkan analisis terhadap kasus madrasah Nizamiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Sirozi dari Rasyid, bahwa politik dalam Islam sama-sama memiliki urgensi yang tinggi dengan pendidikan (Sirozi, 2010). Tanpa adanya otoritas politik, syari'at Islam sulit, bahkan mustahil bisa ditegakkan. Kekuasaan sebagai sarana dalam mempertahankan syari'at Islam. Sedangkan pendidikan bergerak sebagai upaya penyadaran terhadap umat dalam menjalankan syari'at. Tanpa pendidikan umat tidak akan faham terhadap syari'ah. Jika politik (kekuasaan) berfungsi sebagai pengayom dari atas, maka pendidikan akan selalu berbenah diri melalui arus bawah.

Dari adanya pertautan yang erat antara politik penguasa dan pendidikan, maka ada beberapa definisi politik pendidikan yang bisa dipaparkan; di antaranya menurut Lee C. Deighton yang dikutip oleh Bakri adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara (Bakri, 2010). Sedangkan menurut Kimbrough dalam Sirozi, politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan di tingkat lokal maupun nasional (Sirozi, 2010).

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa politik pendidikan Islam adalah seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa dari suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di negara tersebut. Ada kalanya kebijakan itu memiliki orientasi untuk mempertahankan atau memperkuat otoritas penguasa, atau ideologi yang dijadikan dasar pijakan oleh negara tersebut.

### Definisi Sumber Daya Manusia

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah terbaik di antara makhluk lainnya. Muzayyin Arifin mengatakan bahwa dalam struktur jasmaniah dan rohaniah itu Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang menurut aliran psikologi behaviorisme disebut *pre potence reflex* (kemampuan dasar yang secara otomatis berkembang) (Muzayyin Arifin, 2003).

Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. SDM secara konseptual memandang manusia sebagai suatu kesatuan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat dilihat sebagai sinergistik antara kualitas rohani dan jasmani yang dimiliki oleh individu dari warga bangsa yang bersangkutan.

Kualitas jasmani dan rohani tersebut oleh Emil Salim, seperti dikutip oleh Anggan Suhandana, disebut sebagai kualitas fisik dan non fisik. Lebih lanjut, wujud kualitas fisik ditampakkan oleh postur tubuh, kekuatan, daya tahan, kesehatan, dan kesegaran jasmani. Dari sudut pandang ilmu pendidikan, kualitas non fisik manusia mencakup ranah (domain) kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kualitas ranah kognitif digambarkan oleh tingkat kecerdasan individu, sedangkan kualitas ranah afektif digambarkan oleh kadar keimanan, budi pekerti, integritas kepribadian, serta ciri-ciri kemandirian lainnya. Sementara itu, kualitas

ranah psikomotorik dicerminkan oleh tingkat keterampilan, produktivitas, dan kecakapan mendayagunakan peluang berinovasi (Anggan Suhandana, 2007).

Sebenarnya tiga kata yang terdapat dalam istilah sumber daya manusia, yaitu: sumber, daya, dan manusia, tak ada satupun yang sulit untuk dipahami. Ketiga kata itu tentu mempunyai arti dan dengan mudah dapat dipahami artinya. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai daya yang bersumber dari manusia. Daya ini dapat pula disebut kemampuan, tenaga, energi, atau kekuatan (power) (Buchori Zainun, 2003).

Walaupun demikian, istilah sumber daya manusia telah didefinisikan bermacam-macam oleh para pakar pendidikan maupun psikologi. Diantaranya ialah apa yang telah diutarakan oleh Yusuf Suit yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. 10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya manusia diartikan sebagai potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi (Depdikbud).

Sedangkan dalam Kamus Webster, yang dimaksud sumber daya manusia ialah alat atau kekayaan yang tersedia (available means), kemampuan atau bahan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Definisi dari dua kamus di atas diperkuat oleh pernyataan Deacon dan Malock dalam Gross Crandall dan Knol yang mendefinisikan sumber daya manusia sebagai alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi keinginan (Suprihatin, 2003).

Gunawan A. Wardhana sebagaimana yang dikutip oleh A.S. Munandar sepenggal kalimat kutipan dari Harbison menyatakan bahwa sumber daya manusia mencakup semua energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan secara potensial dapat atau harus dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat (Munandar, 2001).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu adalah tenaga atau kekuatan/kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri.

### **Potensi Dasar Manusia**

Para filosof tidak pernah sependapat tentang potensi apa yang perlu dikembangkan oleh manusia. Melalui pendekatan historis, Hasan Langgulung menjelaskan bahwa di Yunani Kuno satu-satunya potensi manusia yang harus dikembangkan di kerajaan Sparta adalah potensi jasmaninya, tetapi sebaliknya di kerajaan Athena yang dipentingkan adalah kecerdasan otaknya (Hasan Langgulung, 2005).

Beberapa ahli filsafat pendidikan Islam telah mencoba mengklasifikasikan potensi manusia, diantaranya yaitu menurut KH. A. Azhar Basyir, bila manusia ditinjau dari substansinya, maka manusia terdiri dari potensi materi yang berasal dari bumi dan potensi ruh yang berasal dari Tuhan.<sup>19</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Syahminan Zaini yang menyatakan bahwa unsur pembentuk manusia terdiri dari tanah dan potensi rohani dari Allah (Syahminan Zaini, 2006).

Dalam redaksi lain, Muhaimin dan AbdulMujib berpendapat bahwa pada hakekatnya manusia terdiri dari komponen jasad(jasmani) dan komponen jiwa (rohani), menurut mereka komponen jasmani berasal dari tanah dan komponen rohani ditiupkan oleh Allah (Muhaimin dan Mujib, 2003). Demikian pula kesimpulan yang diambil Abuddin Nata berdasarkan pendapat para ahli filsafat pendidikan, bahwa secara umum manusia memiliki dua potensi, yaitu potensi jasmani dan potensi rohani.<sup>22</sup> Dari pendapat yang dikemukakan di atas, ternyata potensi manusia dapat diklasifikasikan kepada potensi jasmani dan potensi rohani. Berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan di atas, beberapa ahli filsafat pendidikan menguraikan potensi rohani manusia ke dalam beberapa bagian, sebagaimana pendapat Barmawie Umary yang menyatakan bahwa potensi rohani manusia itu terdiri dari empat unsur pokok, yaitu roh, qalb, nafs, dan akal (Barmawi Umary, 1989). Pembagian Barmawie Umary ini sedikit berbeda dengan klasifikasi potensi rohani yang dikemukakan oleh Muhaimin dan Abdul Mujib. Menurut keduanya potensi rohani manusia itu dibagi tiga yaitu, potensi fitrah, qalb, dan akal (Muhaimin dan Mujib, 2003).

### **Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menurut Islam**

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada Pencipta (Zakiah Daradjat, 1996).

Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk (hidayah) Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakekat penciptaannya (Jalaludin, 2006). Sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Quthb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikitpun, baik dari segi jasmani maupun segi rohani, baik kehidupannya secara mental, dan segala kegiatannya di bumi ini. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang terdapat dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepadanya, tidak ada sedikitpun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selain apa yang dijadikannya sesuai dengan fitrahnya. Pendapat ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa dalam rangka mencapai pendidikan Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi secara serasi dan seimbang (Abuddin Nata, 2007).

Hasan Langgulung melihat potensi yang ada pada manusia sangat penting sebagai karunia yang diberikan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Suatu kedudukan yang istimewa di dalam alam semesta ini. Manusia tidak akan mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah, tidak akan mampu mengemban tanggung jawabnya jikalau ia tidak dilengkapi dengan potensipotensi tersebut dan mengembangkannya sebagai sebuah kekuatan dan nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Artinya, jika kualitas SDM manusianya berkualitas maka ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Kualitas SDM ini tentu saja tak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani-spiritual, yaitu berupa iman dan taqwa (imtaq). Dari penjabaran di atas dapat dimengerti bahwa pengembangan SDM sangat penting, tak hanya dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tak kalah pentingnya adalah dimensi spiritual dalam pengembangan SDM. Kualitas SDM tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental-spiritual keagamaan.

Sumber daya manusia yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniah. Dengan demikian akan lebih mempunyai tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan serta teknologi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan, hanya akan membawa manusia ke arah pengejaran kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka. Dan jika semangat hedonisme sudah menguasai manusia, bisa diramalkan yang terjadi adalah eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan manusia terhadap manusia lain.<sup>29</sup> Kesimpulan lengkap yang berkait dengan acuan bagi pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam, menjadi .membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertaqwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam.

## SIMPULAN

Politik pendidikan Islam merupakan seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa dari suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Terjadinya relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa pra kemerdekaan bahkan jauh sebelum itu. Jika melihat dinamika politik pendidikan Islam mulai pra kemerdekaan sampai dengan masa reformasi, kebijakan pemerintah terus berkembang pada arah yang positif. Yaitu pada upaya menciptakan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spritual, serta menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan hidupnya

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa di antara makhluk lainnya. Kemampuan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Secara umum potensi manusia diklasifikasikan kepada potensi jasmani dan potensi rohani. Hasan Langgulung melihat potensi yang ada pada manusia tersebut sangat penting sebagai karunia yang diberikan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, inilah tujuan utama atau akhir (ultimate aim) pendidikan Islam.

Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk (hidayah) Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakekat penciptaannya. Pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam, ialah membentuk manusia yang berakhlak mulia, senantiasa menyembah Allah yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertaqwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmadi. (2002). *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya media.

- Arifin, Muzayyin. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bakri, M. (2010). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam; Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran*. Surabaya: Visipress Media.
- Budihardjo, M. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Depdikbud, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ellong, T. D. E., & Pawero, A. M. D. (2018). *Islamic Education Management for Millennial Generation; Quality and Competitiveness*. In *The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Fadjar, A. Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Cet II, Bandung: Mizan, 1999.
- Gunaharja, Suprihatin, et.al. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ismail. (2016). *Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)*. Journal of Social Community STAI NATA Sampang, 1(1).
- Jalaluddin. (2004). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Langgulong, Hasan. 2005. *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Latif, Abdul. (1996). *Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Menghadapi Era Pasar Bebas*. Jakarta: DPP HIPPI.
- Marimba, A. D. (2009). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Muhaimin dan Abdul Mujib. (2003). *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Tri Genda Karya.
- Muhmidayeli. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Munandar, A.S. (2001). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Djaya Pirusa.
- Nata, Abuddin. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Oxford. (2011). *Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- Pawero, A. M. (2017). *Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. *Journal of Islamic Education Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/j.v2i2.700>
- Pawero, A. M. D., & Dkk. (2019). *Contemporary Issues on Religion and Multiculturalism*. Manado: Cv. Istana Agency.
- Sirozi, M. (2010). *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhandana, Anggan. (2007). *Pendidikan Nasional Sebagai Instrumen Pengembangan SDM*. Bandung: Mizan
- Tim Redaksi. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umary, Barmawie. (1989). *Materi Akhlak Solo: Ramadhani*.
- Vaizey, John, (1980). *Pendidikan di Dunia Modern*. Jakarta: Gunung Agung
- Zaini, Syahminan. (2008). *Penyakit Rohani Pengobatannya*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Zainun, Buchori. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gunung Agung.